

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ervina Koesarieyanto, L. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Sebelum dan Sesudah Diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Revitalisasi Jurnal Ilmu Manajemen*, 04(9), 1689–1699.
- Fathiyah dan Masnun. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrua tahun 2014 -2015. 1(1), 70–77.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3), 910–924.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan

- Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Muarif dan Indriani, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Nasution, N. A., Si, M., Panggabean, F. Y., & Si, M. (2017). Vol. 8 No.1 Juli 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*, 8(1), 1–19.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7, 83–112.
- Purnamasari, A. T. dan, & Dwiranda. (2015). Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. 3, 705–722.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 40–54.
- Rohman, Abdul; Daud, R. U. (2018). Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrua dan Tingkatan Akrua Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 11(3), 486–512.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(2), 738–747.

- Rukayah. Kusumawati, Nugrahini dan Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Akuntansi*, 4(2), 1–11.
- Sholikhah, M. (2018). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 45.
- Sino, Supina. Ruliana, Titin. Latif, I. N. (2015). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Suranta, S., Perdana, H. D., Syafiqurrahman, M., Akuntansi, P. S., & Maret, U. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. 5(2), 111–124. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284>
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *InFestasi*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>
- Yulian, T. N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi*, 5, 1–28. <http://eprints.perbanas.ac.id/3227/>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.